

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam menyediakan akses pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, dengan memperhatikan kualitas, pemerataan, dan keterjangkauannya (Kemenkes RI, 2020). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) merupakan program jaminan sosial di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Program ini diselenggarakan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam menjamin agar setiap warga negara memperoleh akses layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkeadilan, salah satu bentuk layanan kesehatan yang dijamin dalam program ini adalah pelayanan kesehatan primer, seperti di puskesmas (BPJS Kesehatan, 2023).

Data Laporan Kinerja Tahunan BPJS Kesehatan tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 252 juta penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Capaian ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia (BPJS Kesehatan, 2023). Di Provinsi Jawa Barat, cakupan kepesertaan JKN hingga Desember 2023 telah mencapai sekitar 97,3%, atau setara dengan 50,2 juta jiwa. Tingginya tingkat kepesertaan tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2023; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023). Meskipun cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah luas, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun behavioral. Kendala tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur kesehatan, distribusi tenaga

kesehatan yang belum merata, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan prosedur layanan kesehatan. Kondisi ini berdampak pada ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan di berbagai wilayah (Maharani dkk, 2024).

Data morbiditas peserta JKN tahun 2023 menunjukkan bahwa penyakit gigi dan mulut merupakan salah satu dari 10 besar penyakit rawat jalan dengan jumlah kasus mencapai sekitar 11,4 juta kunjungan, menempati peringkat kelima setelah hipertensi, ISPA, dispepsia, dan diabetes. Secara spesifik, untuk kategori penyakit gigi dan jaringan pendukung, terdapat lebih dari 5,2 juta kasus yang ditangani melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (BPJS Kesehatan, 2023). Tingkat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Profil Kesehatan tahun 2023, prevalensi karies gigi pada anak usia dini mencapai 72,3%, angka yang lebih tinggi dari rata-rata nasional (67,3%) dan mengindikasikan beban penyakit gigi yang signifikan (Dinkes Jabar, 2023). Sementara di Kabupaten Bekasi, gangguan gigi dan mulut termasuk dalam lima besar penyakit terbanyak yang ditangani di puskesmas, dengan persentase mencapai 12,4% dari total kunjungan (Dinkes Kab. Bekasi, 2023).

Pengetahuan peserta BPJS Kesehatan tentang hak dan kewajiban, termasuk jenis layanan gigi yang dijamin, menjadi faktor kritis dalam keberhasilan program JKN. Peserta yang memiliki pengetahuan baik cenderung lebih optimal dalam memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, termasuk untuk tujuan preventif dan promotif (Rahmawati dkk., 2023). Pengetahuan masyarakat tentang program BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana layanan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengetahuan masyarakat tentang program BPJS Kesehatan masih bervariasi, khususnya terkait pemanfaatan layanan Kesehatan gigi. Studi yang dilakukan oleh Handayani dkk. (2023) di wilayah kerja puskesmas Sumbersari Kabupaten Jember, Jawa Timur, menunjukkan bahwa hanya sekitar 48% responden yang mengetahui bahwa pelayanan gigi seperti penambalan sederhana, pencabutan gigi dan pembersihan karang gigi ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pengetahuan masyarakat tentang cakupan layanan gigi BPJS masih bervariasi dan seringkali tidak memadai. Pengukuran pengetahuan peserta BPJS tentang layanan gigi dilakukan dengan mengadaptasi instrumen dari penelitian

Rahmawati & Santoso (2023) yang telah teruji validitasnya. Instrumen ini dirancang khusus untuk mengukur pemahaman peserta tentang hak layanan gigi dasar yang dijamin BPJS, meliputi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Menurut Wulandari & Handayani (2022), pengukuran pengetahuan dalam BPJS memerlukan pendekatan yang komprehensif karena melibatkan aspek administratif, klinis, dan regulasi. Berdasarkan laporan status kesehatan mulut *World Health Organization* (WHO) tahun 2022, penyakit mulut adalah penyakit tidak menular paling tersebar luas yang mempengaruhi hampir setengah dari populasi dunia (3,5 miliar orang di seluruh dunia), meskipun sebagian besar dapat dicegah (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes R.I., 2023).

Masalah gigi dan mulut merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan pada tingkat global, regional dan nasional, yang mana dapat membahayakan kesehatan individu dan populasi, meskipun hal ini sering tidak diakui secara publik. Astuti dkk. (2023) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman peserta mengenai cakupan jaminan, seperti layanan rawat jalan tingkat pertama, rujukan, hingga hak untuk memilih fasilitas kesehatan, menyebabkan sebagian besar peserta hanya memanfaatkan layanan ketika mengalami kondisi sakit berat, bukan untuk upaya pencegahan. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur administrasi, seperti rujukan berjenjang, juga menjadi hambatan dalam akses layanan, sehingga peserta belum dapat memanfaatkan manfaat program JKN secara optimal. Menurut Putri, Santoso, & Lestari (2022), banyak peserta BPJS Kesehatan yang belum menyadari bahwa pelayanan kesehatan gigi dasar, seperti penambalan sederhana, pencabutan gigi, hingga pembersihan karang gigi dengan kasus karang gigi dan gusi berdarah, dengan mudah dapat diakses secara gratis melalui manfaat BPJS Kesehatan.

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan pada tingkat pertama (FKTP) yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan Kesehatan dasar kepada masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 (KEMENKES, 2019), Puskesmas memiliki peran dan fungsi sebagai pusat pembangunan Kesehatan masyarakat, meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, serta pusat pembinaan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

Puskesmas Mangunjaya, yang menjadi lokasi penelitian, memiliki visi yaitu “Terjuwudnya pelayanan kesehatan yang terbaik di Desa Mangunjaya menuju masyarakat yang sehat dan mandiri”. Puskesmas Mangunjaya juga memiliki enam misi strategis yang mendukung tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal di wilayah kerjanya. Misi tersebut meliputi pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang mencakup keterampilan dan ilmu pengetahuan, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar, serta mengembangkan sistem manajemen yang akuntabel. Puskesmas juga berkomitmen untuk menjalin kemitraan lintas program dan lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat, serta mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat. Semua misi ini dirancang sebagai upaya terpadu guna meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan di daerah kerja Puskesmas Mangunjaya.

Berdasarkan data kunjungan di Puskesmas Mangunjaya selama enam bulan terakhir Januari sampai dengan Juli tahun 2025, tercatat jumlah kunjungan peserta BPJS khususnya poli gigi yang bervariasi kunjungannya. Total kunjungan pasien peserta BPJS ke Poli Gigi dari bulan Januari hingga Juli 2025 mencapai 1.050 kunjungan.

Hasil pra-penelitian yang dilakukan di Puskesmas Mangunjaya pada tanggal 29 September 2025 dengan menggunakan kuesioner terhadap 10 responden, diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan rendah sebanyak 3 orang (30%), pengetahuan sedang 4 orang (40%) dan pengetahuan tinggi sebanyak 3 orang (30%). Dari sisi pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan BPJS Kesehatan, seluruh responden (10 orang) berada pada kategori pemanfaatan yang rendah 7 orang (70%), pemanfaatan yang sedang 2 orang (20%) dan pemanfaatan yang tinggi 1 orang (10%). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan, di mana meskipun tingkat pengetahuan peserta relatif baik, pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui BPJS Kesehatan masih belum optimal. Diperlukan upaya peningkatan motivasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi yang telah tersedia di Puskesmas.

Berdasarkan latar belakang diatas mendasari alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan pengetahuan peserta BPJS Kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan ke Mangunjaya 2025.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah terdapat hubungan pengetahuan peserta BPJS Kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas Mangunjaya ?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis hubungan antara pengetahuan peserta BPJS Kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan gigi dan mulut di puskesmas.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Mengetahui tingkat pengetahuan peserta BPJS Kesehatan mengenai pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas Mangunjaya Bekasi.

1.3.2.2 Mengetahui tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas oleh peserta BPJS Kesehatan.

1.3.2.3 Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan BPJS Kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Mangunjaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Instansi Puskemas Mangunjaya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelayanan gigi yang ada sudah dimanfaatkan oleh peserta BPJS, serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perbaikan pelayanan ke depan.

1.4.2 Bagi Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui program BPJS Kesehatan di Puskesmas.

1.4.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam bagi peneliti mengenai hubungan antara pengetahuan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

1.5 Keaslian Penelitian

Sepengetahuan peneliti bahwa penelitian tentang hubungan pengetahuan peserta BPJS dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas Mangunjaya belum pernah dilakukan penelitian, Adapun penelitian serupa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti pada tabel keaslian penelitian berikut ini.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Peneliti (Tahun) & Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Hubungan Pengetahuan Tentang BPJS Kesehatan Gigi dan Mulut Dengan Pemanfaatan Fasilitas BPJS Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Peserta BPJS di Dusun Watu Ulo Jember Pangestu (2018).	Kuantitatif analitik, <i>cross-sectional</i> , 89 responden, <i>purposive sampling</i> , instrumen wawancara, kuesioner	Terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dan pemanfaatan layanan gigi BPJS; mayoritas responden berpengetahuan sangat rendah	Sama-sama meneliti pemanfaatan layanan gigi BPJS dengan pendekatan kuantitatif <i>cross-sectional</i> dan instrumen kuesioner di Puskesmas	Lokasi di Dusun Watu Ulo (Jember), responden 89, variabel meliputi pengetahuan dan pemanfaatan BPJS Kesehatan khususnya di bidang gigi dan mulut di Puskesmas
2	Hubungan Pengetahuan dengan Pemanfaatan BPJS Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Program JKN di Masyarakat Gampong Ujung Kalak Aceh Barat Mulia (2024).	<i>Cross-sectional</i> , 105 responden, <i>stratified random sampling</i> , instrumen kuesioner	Terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dan pemanfaatan layanan gigi BPJS; mayoritas responden berpengetahuan baik dan memanfaatkannya dengan optimal	Sama-sama meneliti hubungan pengetahuan dengan pemanfaatan layanan gigi BPJS menggunakan desain <i>cross-sectional</i> dan kuesioner	Lokasi di Gampong Ujung Kalak (Aceh Barat), responden 105, menggunakan <i>stratified random sampling</i>

3	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Gigi pada Peserta BPJS di Puskesmas Setabelan Kota Surakarta Khoiriyah (2017).	Kuantitatif analitik, <i>cross-sectional</i> , 125 responden, <i>accidental sampling</i> , instrumen kuesioner	Tidak ada hubungan signifikan antara pengetahuan, kondisi gigi, akses, maupun kepuasan dengan pemanfaatan layanan gigi BPJS, meski mayoritas responden berpengetahuan rendah dan kurang puas	Sama-sama meneliti pemanfaatan layanan gigi BPJS dengan pendekatan kuantitatif <i>cross-sectional</i> dan instrumen kuesioner di puskesmas	Lokasi di Puskesmas Setabelan (Surakarta), responden 125, variabel meliputi pengetahuan, kondisi gigi, akses, kepuasan
---	--	--	--	--	--
